

ETIKA PEMIMPIN POLITIK DALAM KITAB *KUMPULAN RINGKAS BERBETULAN LEKAS* (PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*)

Abd. Rahman

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Jalan Lintas Barat KM 19 Kab. Bitan Prov. Kepulauan Riau
Pos-el: rahman@stainkepri.ac.id

Abstract: The leader has the power to govern the country with the responsibility of providing welfare, peace and tranquility. However, the power can also be bad if it is misused. This article intends to discuss the ethics of political leaders in Raja Ali Kelana's *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas* (KRBL) from the perspective of *maqashid al-syari'ah*. The manuscript which is the realm of Malay scholarship is analyzed with a content analysis approach. From the study, this work was born from the background of political and religious events that existed on Penyengat Island at that time. This KRBL is written briefly but has the essence of a scientific message for each mastery. The results of this study, it can be seen that five important points in the ethics of power must be guarded by state leaders, namely maintaining religion and the state, being fair, welfare of the people, loyal and dedicated and maintaining togetherness and unity. According to Raja Ali Kelana, it is very important for every leader to uphold the normative ethical values of religion because power can easily lead to slipping into wrongdoing. From the analysis, this concept is in line with the ethics of power which is based on *maqashid al-syari'ah*. So it is very natural that the concept of power ethics idealized by Raja Ali Kelana is also called the *maqashidi* power ethic, which is an ethic that refers to the spirit of the values of *maqashid al-sharia*.

Keywords: The ethics of *Maqashidi*; the ethics of power; Malay Manuscript; raja ali kelana

Abstrak: Pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengatur negara dengan tanggung jawab memberikan kesejahteraan, kesentosaan dan ketentraman. Namun, kuasa yang dimiliki seorang pemimpin juga bisa menjadi buruk bila disalahgunakan. Artikel ini hendak mengupas tentang etika pemimpin politik dalam Kitab *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas* (KRBL) karya Raja Ali Kelana dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. Naskah yang menjadi khazanah keilmuan melayu ini ditelaah dengan pendekatan analisa konten. Dari kajian tersebut, bahwa karya ini lahir dari latar belakang peristiwa politik dan keimuan yang ada di pulau Penyengat ketika itu. KRBL ini ditulis secara ringkas namun memiliki sari pati pesan keilmuan bagi setiap penguasan. Dari hasil kajian terhadap naskah ini dapat diketahui bahwa lima poin penting dalam etika kekuasaan yang harus dijaga oleh pemimpin negara, yakni menjaga agama dan negara, bersikap adil, menyejahterakan rakyat, setia dan berdedikasi serta menjaga kebersamaan dan persatuan. Menurut Raja Ali Kelana, sangat penting bagi setiap pemimpin untuk memegang nilai etika normatif agama karena kekuasaan itu mudah membawa tergelincir kepada kezalimat. Dari hasil analisa, konsep ini sejalan dengan etika kekuasaan yang berlandaskan pada *maqashid al-syari'ah*. Maka sangat wajar apabila konsep etika kekuasaan yang diidealkan Raja Ali Kelana ini disebut juga sebagai etika kekuasaan *maqashidi*, yakni suatu etika yang merujuk pada semangat nilai-nilai *maqashid al-syariah*.

Kata kunci: etika *maqashidi*; etika kekuasaan; naskah melayu; raja ali kelana

Pendahuluan

Kekuasaan menjadi perbincangan menarik dalam kajian ilmu politik sebab orientasi kekuasaan ialah memberikan kemaslahatan bagi rakyat dan negara.¹ Mencapai kesejahteraan inilah yang menjadi penting. Misalnya, dalam setiap kali suksesi dan pemilihan umum pemimpin, janji-janji untuk menyejahterakan rakyat dengan mudah terdengar. Meski demikian, kekuasaan juga bisa melahirkan penyimpangan. Bentuk dan variannya cukup beragam, baik terkait dengan penguasanya, sistemnya, dan rakyat yang dikuasai. Dan lebih pelik lagi ketika “rebutan” kepentingan elite penguasa menyusup pada kebijakan politiknya.² Ada dua indikasi kepentingan kolektif dan sektoral memasuki kebijakan politik; faktor internal dalam kekuasaan pada sebuah negara itu sendiri³ dan faktor eksternal yang berupa intervensi asing akibat suatu ketergantungan politis. Penyalahgunaan kekuasaan juga bentuk dari malpraktik kekuasaan yang bisa menimbulkan rezim tirani, otoriter, dan

diktator. Dengan demikian, malpraktik kekuasaan merupakan kejahatan struktural.⁴

fenomena kekuasaan yang terus tumbuh dinamis ini menjadi kajian ilmu politik yang selalu menarik karena selalu terjadi benturan antara tataran ideal dan realitas. Tataran ideal dari kekuasaan itu melahirkan seni untuk mengatur masyarakat mencapai tujuannya yang disebut dengan ilmu politik. Dalam ilmu politik, ajaran filsafat moral diadopsi ke dalam filsafat politik yang diturunkan menjadi etika politik lalu ke etika kekuasaan. Hal ini untuk mengimbangi tujuan mulia dari kekuasaan sementara manusia memiliki dua sifat dasar dalam diri, baik dan buruk.⁵ Norma dan etika adalah bagian penting dalam mengatur dan mengukur tingkah dan perilaku manusia agar tindakannya tidak semena-mena. Moral memiliki makna penting karena akan mengetuk nurani sehingga dalam kehidupan mudah disesuaikan dengan etika politik dalam penyelenggaraan negara atau etika kekuasaan. Dimensi moral ini merupakan dasar dari rasionalitas kegiatan politik.⁶

¹Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 95.

²Dennis F. Thompson mengistilahkannya dengan “tangan-tangan kotor demokratik”. Pejabat negara bisa mengatasnamakan rakyat untuk sebuah kebijakan yang hanya memenuhi kepentingan individu dan kelompoknya. Tindakan demikian, menurut Thompson termasuk perbuatan immoral dalam politik namun rakyatlah yang membersihkannya. Lihat Dennis Frank Thompson, *Etika Politik Pejabat Negara* (Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. 1–22.

³Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 37–56.

⁴Johannes Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), h. 41–53.

⁵Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1991), 211–217; Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 304–322; Niccolo Machiavelli, *Sang Pangeran - Risalah Politik Abad Ke-15* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).

⁶Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, h. 23.

Telah banyak teori, konsep dan etika kepemimpinan dari cendekiawan dan filosof yang mengajarkan agar pemimpin menjalankan kekuasaan dengan berpegang pada etika kepemimpinan. Kajian tentang kepemimpinan telah banyak diungkap oleh para pemikir Islam seperti Abu Al-hasan Al-Mawardi (w.1058), Abu Hamid Al-Ghazali (w.1111), Ibnu Taimiyah (w.1328), Ibnu Khaldun (w.1406) dan lainnya dari para pemikir politik era klasik dan Abu A'la al-Maududi (w.1979), Ali Abd Raziq (w.1966), Hasan al-Banna (w.1949), dan lainnya pada era moderen ini. Hampir semua pemikir menitikberatkan bahwa tugas penguasa politik untuk melayani kepentingan umum guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di kalangan ilmuwan Islam, penguasa merupakan orang yang menggantikan posisi kenabian untuk mengurus agama dan juga hal ihwal keduniaan.⁷ Pandangan serupa itu juga banyak dikembangkan oleh cendekia dari Melayu, khususnya di kesultanan Riau-Lingga (1823-1912).⁸ Beberapa cendekia

yang terkemuka di Riau-Lingga antaranya Raja Ahmad, Raja Ali Haji (w.1873), Raja Ja'far (w.1831), Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi (w.1899), Raja Ali Kelana (w.1928), dan lain sebagainya juga telah menyinggung tentang kepemimpinan dalam karya-karya mereka.

Satu di antara karya yang patut mendapat perhatian yakni, karya Raja Ali Kelana (w.1927) dalam *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas* (KRBL)⁹. Terdapat tiga penelitian yang menelaah KRBL ini, yaitu Jaelani Harun (2001), Asywardi Syahri (2006) dan Abd. Rahman (2016). Padahal, dalam karya ini banyak mengungkap peran penguasa dalam menjaga keutuhan pemerintahan dan wilayah kekuasaan agar tetap merdeka dan kehidupan rakyat bisa berjalan normal. Menurut Raja Ali Kelana, seorang pemimpin sangat menentukan nasib negara dan seluruh penduduk yang berada di dalamnya. Oleh sebab itu, penguasa harus bisa menjalankan fungsinya dengan tetap menjaga struktur kekuasaan.¹⁰ Secara

⁷Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthoniyyah Wa al-Wilayat Ad-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr (Bairut: Dar al-Fikr, tt), h. 5.

⁸Kesultanan Riau-Lingga merupakan pecahan dari Kesultanan Johor, Pahang, Riau Lingga pasca perjanjian Traktat London antara Belanda dan Inggris pada 1824. Akibatnya kesultanan tersebut terbagi menjadi dua wilayah, yakni Johor-Pahang menjadi wilayah tersendiri di bawah koloni Inggris dan Riau-Lingga menjadi wilayah yang berada di bawah koloni Belanda. Erwiza Erman, ed., *Sejarah Kesultanan Riau-Lingga dalam Perspektif Hukum dan Budaya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2012), 31–32; Abd. Rahman, “Konsep Mamlukah dan Keharusan Masalah dalam Etika Kekuasaan Raja Ali Kelana 1849-1927” (masters, UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 2016), accessed September 1, 2020, <http://digilib.uin-suka.ac.id/21893/>; M Amin Yacob, *Sejarah Kerajaan Riau-Lingga* (Pekanbaru: Unri Press, 2004), h. 75.

⁹Menurut Jelani Harun, KRBL ini merupakan kitab ketatanegaraan terakhir yang dilahirkan oleh intelektual Riau-Lingga. Jelani Harun, “Kitab Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas: Karya Ketatanegaraan Melayu Yang Terakhir,” *Sari (ATMA)* 19 (2001): h. 133–158.

¹⁰Dalam dunia Melayu, raja ataupun sultan merupakan seorang panutan yang harus memiliki kriteria ideal karena ia merupakan *khalifatullah fi al-ardh*. Dan tidak sedikit dari raja-raja di Melayu yang menggunakan gelar *zhill Allah fi al-'alam* atau *zhill Allah fi al-ardh*. Hal itu banyak disebut dalam karya-karya klasik seperti *Taj al-Salatin* karya Bukhari al-

struktural, dalam pandangan Raja Ali Kelana, seorang raja itu ibarat anatomi anggota tubuh yakni raja ibarat hati, anak kepala ibarat istana, ilmu pengetahuan ibarat bentara kanan, akal ibarat bentara kiri, mata-telinga-hidung-mulut ibarat menteri dalam, dua tangan dan kaki ibarat menteri luar, dan anak-anak jari ibarat segala amir.¹¹ Sedangkan secara fungsional, seorang pemimpin itu harus mampu memberikan rasa keadilan, ketenteraman, dan kesejahteraan kepada rakyat. Maka seorang pemimpin itu memiliki fungsinya yang mampu memberikan dampak terhadap segala tindakan yang dilakukannya.

Pemikiran Raja Ali Kelana yang berlandaskan pada norma Islam ini sudah semestinya mengikuti nalar berpikir *maqashid al-syariah* karena tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil. Nilai-nilai *maqashid al-syari'ah* sebagaimana dalam konsep Abu Ishaq Al-Syathibi (w.1388), mencakup lima hal pokok yakni menjaga agama (*hifz al-diin*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga

keturunan (*hifz al-nals*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).¹² Menurut Asy-Syathibi, ada tiga tingkatan tentang *maqashid al-Syariah* tersebut.¹³ Pertama, *maqashid al-syari'ah al-dharuriyyah*, yakni aturan syariat yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap lima hal pokok tersebut. Syariat tidak bisa hanya dimaknai secara serampangan yang bisa bertentangan dalam menjaga lima hal pokok tersebut. Kedua, *maqashid al-syari'ah al-hajiyyah*, yakni aturan syariat yang memudahkan manusia untuk melaksanakan lima hal pokok sehingga hal-hal yang bertentangan dengannya harus dilawan ataupun disingkirkan. Ketiga, *maqashid al-syari'ah al-tahshiniyyah*, yakni aturan yang memungkinkan manusia melakukan yang terbaik untuk mewujudkan perlindungan terhadap lima hal pokok tersebut. Perspektif *maqashid al-syariah* tersebut menjadi landasan teoritik untuk mengungkap pemikiran etika pemimpin politik Raja Ali Kelana yang tertuang dalam KRBL sebagaimana yang menjadi fokus kajian ini. Dalam hal ini juga banyak yang telah menjadikan rumusan tersebut sebagai tolok ukur bagi kepemimpinan.¹⁴

Jauhari tahun 1603 M, *Sulalat al-Salatin* atau yang dikenal dengan *Sejarah Melayu* oleh Tun Sri Lanang tahun 1612 M, *Bustan al-Salatin* oleh Nuruddin al-Raniri tahun 1638 M, dan *Tsamarah al-Muhimmah* oleh Raja Ali Haji tahun 1870. Menurut Mahdini, Raja Ali Haji menolak istilah itu karena dinilai terlalu berlebihan. Mahdini juga berpendapat bahwa gelar-gelar itu dipengaruhi oleh tradisi kerajaan Hindu Budha yang pernah berkembang di Nusantara. Mahdini, "Raja dan Kerajaan Menurut Raja Ali Haji" (Doktor, IAIN Sunan Kalijaga, 2001), 5.

¹¹Raja Ali Kelana, *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas* (Singapura: Al-Imam, 1910), h. 4–10.

¹²Abu Ishaq Al- Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, 2 vols (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kura, 1975), h. 37 & 54.

¹³ Abu Ishaq Al- Syathibi, *Al-Muwafaqat...* 6–8, h. 23 dan 45.

¹⁴Lihat Yovenska L.man and Olan Darmadi, "Karakteristik Pemimin dalam Islam," *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4, no. 2 (December 8, 2019): 150, accessed November 9,

Kitab Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas (KRBL)

Kitab *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas (KRBL)* ini ditulis oleh Raja Ali Kelana, seorang cendekiawan dari di Riau-Lingga. Ia dilahirkan dengan nama Raja Ali. Nama depan dengan sebutan “raja” merupakan gelar turunan bagi keturunan Bugis sebagai pembeda antara kalangan ningrat dari keluarga bangsawan Melayu yang bergelar “Tengku”. Bila diurut, maka ranji dari Raja Ali Kelana ialah Ali ibn Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi bin Raja Ali (YDM VIII w.1857) bin Raja Ja’far (YDM VI w.1832) bin Raja Haji (YDM IV w.1784) bin Upu Daeng Celak (YDM II w.1746).¹⁵ Namun, belum ketahui sejelas kepastian dari tanggal lahirnya. Sebagian kalangan menyebutkan, ia lahir sekitar 1860-an dan 1849-an, tanpa ada kejelasan tentang tanggal dan bulannya.¹⁶

KRBL ini termasuk satu di antara enam karya Raja Ali Kelana di tengah kuatnya tradisi keilmuan di Riau Lingga. Di penghujung abad ke-19 itu, tradisi keilmuan

di Riau-Lingga juga sedang mengalami perkembangan pesat dengan banyaknya cendekia yang aktif dalam sebuah komunitas bernama Rusydiyah Klub yang berkantor di Pulau Penyengat. Pulau ini juga tengah berkembang keilmuan dan gerakan tarekat di Riau Lingga. Raja Ali Kelana juga turut mendapatkan pendidikan langsung dari Raja Ali Haji (1808-1873), cendekiawan yang cukup terkenal dan berpengaruh di Penyengat pada abad ke-19.¹⁷ Bahkan, Raja Muhammad Yusuf pun berguru langsung kepada Raja Ali Haji dan selalu menjadikannya sebagai rujukan untuk petuah dan pengambilan kebijakan kerajaan.¹⁸ Sebagaimana umumnya, sistem pendidikan yang berlaku sistem *halaqah* dan pendidikan privat dengan hanya beberapa murid saja dan banyak didapatkan keluarga kerajaan bangsawan dan ulama setempat.¹⁹

Raja Ali Kelana kemudian diangkat menjadi Engku Kelana untuk menjalankan roda pemerintahan di kerajaan Riau-Lingga. Setelah meletakan jabatan struktural itu, ia

¹⁷Selengkapnya lihat Virginia Matheson, “Pulau Penyengat: Nineteenth Century Islamic Centre of Riau,” *Archipel* 37, no. 1 (1989): 153–172; Muhammad Faisal, *Etika Melayu: Pemikiran Moral Raja Ali Haji* (Bintan: STAIN SAR Press, 2018).

¹⁸Pihak Belanda menaruh curiga kepada Raja Ali Haji karena dinilai sebagai pembisik dan mempengaruhi keputusan Raja Muhammad Yusuf dalam urusan pemerintahan. Bahkan, terkait hal itu, Raja Ali Haji sempat juga menuliskan penjelasannya itu kepada seorang temannya yang bertugas di Keresidenan Tanjungpinang, Van Der Woll, supaya tidak selalu difitnah perihal itu. Lihat Jan Van der Putten and Al Azhar, *Di Dalam Perkenalan Dan Persahabatan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), h.25.

¹⁹UU Hamidy, *Teks Dan Kepengarangan Di Riau* (Pekanbaru: Unri Press, 1998), h.24.

2020,
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2829>.

¹⁵Keterangan lengkap tentang silsilah Melayu dan Bugis ini, lihat Raja Ali Haji, *Silsilah Melayu Bugis* (Tanjungpinang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2007).

¹⁶Aswandi Syahri, dkk., *Raja Ali Kelana (1860-an - 1927) Dan Pondasi Historis Industri Pulau Batam* (Batam: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2007), 4; Rahman, “Konsep Mamlukah dan Keharusan Masalah dalam Etika Kekuasaan Raja Ali Kelana 1849-1927,” h. 37.

juga cukup aktif di organisasi *Jamiyah Rusydiyah* yang kemudian berubah namanya menjadi Rusydiyah Klub. Timothy P. Bernard memperkirakan kelompok ini eksis antara tahun 1895 hingga 1905.²⁰ Sedangkan UU Hamidy menyebutkan mereka telah memperlihatkan eksistensinya pada 1892.²¹ Anggota klub ini dikenal selalu mengkritisi sikap pemerintahan Hindia Belanda dan juga keputusan dari Sultan Abdurrahman sehingga kerap menjadi sorotan dari pemerintahan Hindia Belanda. Kelompok ini disebut sebagai kelompok pembangkang yang kerap mempengaruhi keputusan sultan. Di tengah kondisi itulah, KRBL lahir.

KRBL tidak terlalu kuno karena sudah dicetak menggunakan percetakan litografi. Menurut Ian Proudfoot, ada tiga eksemplar naskah KRBL yang tersimpan di tempat berbeda, yakni di National Library of Singapore dengan nomor katalog MR 297.6 ALI (Q11.4/29) dan kode microfilm NL 7925, Perpustakaan Universitas Malaya Malaysia dengan nomor katalog BL167A1Abbm, dan Perpustakaan SOAS London dengan nomor katalog LIBA800 430093.²² Selain tiga lokasi tersebut,

disebutkan juga bahwa perpustakaan di Penyengat menyimpan naskah tersebut. Selain itu, belum diketahui apakah ada perorangan yang masih menyimpan naskah penting ini. Naskah ini juga telah dialihaksarakan oleh Hasan Junus dan Hamzah Yunus.²³

Naskah di setiap perpustakaan itu adalah naskah dengan tahun penerbitan dan cetakan yang sama. Hingga saat ini, edisi KRBL yang terlacak yakni hanya satu edisi saja. Artinya, KRBL tidak mengalami cetak ulang sejak cetakan pertamanya oleh penerbit Mathba'ah Al-Imam di Singapura pada tahun 1328 Hijriah atau 1910 Masehi. Pada naskah ini, penulis menggunakan naskah koleksi National Library of Singapore. Berikut keterangan identitas dari buku tersebut.

Judul Lengkap:

*Inilah Kitab Kumpulan Ringkas Berbetulan
Lekas pada Orang yang Pantas*

Penulis:

*Raja Ali bin Almarhum Yang Dipertuan
Muda Riau*

Penerbit:

*Mathba'ah al-Imam, Robinson Road 26
Singapura*

²⁰Timothy P. Barnard, "Taman Penghiburan: Entertainment and the Riau Élite in the Late 19th Century," *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 67, no. 2 (267 (1994): 26.

²¹Hamidy, *Teks Dan Kepingarangan Di Riau*, h.61–64.

²²I. Proudfoot, *Early Malay Printed Books: A Provisional Account of Materials Published in the Singapore-Malaysia Area up to 1920, Noting Holdings in Major Public Collections* (Kuala

Lumpur: Academy of Malay Studies and the Library, University of Malaya, 1993), h.315.

²³R. Hamzah Yunus, *Naskah-naskah kuno Riau* (Pekanbaru: Pusat Maklumat Kebudayaan Melayu Riau, Pulau Penyengat dengan Yayasan Sosial Chevron dan Texaco, Indonesia, 2001), h. 119–171.

Tahun:
1328 Hijriah (1910 M)

Tebal:
iii+65 halaman
Ukuran Kertas :
21,5 x 15,5 Cm
Baris Teks:
24 baris

Senarai keterangan buku di atas terdapat pada bagian sampul depan KRBL kecuali tentang tebal dan ukuran. Di sampul depan ini juga terdapat imbauan tentang hak cipta dari buku yang berbunyi, *“tiada dibenarkan siapa-siapa pun mencapnya dengan ketiadaan izin muzdir Al-Imam.”* Sedangkan sampul belakang KRBL ini berisikan daftar buku atau kitab yang diterbitkan oleh Mathba’ah Al-Imam.

Sebelum memasuki isinya atau setelah bagian sampul, terdapat senarai daftar ralat atas kesalahan beberapa penulisan yang KRBL yang terdiri dua halaman. Ada 28 daftar kata yang diralat dengan urutan halaman, lalu baris, kata yang salah, dan diakhiri oleh kata pembetulannya. Hal ini tentu untuk memudahkan pembaca dalam memahami kandungan sebab tidak sedikit rangkaian kata yang disusun menggunakan huruf Arab ini memiliki persamaan dalam penulisan, tetapi berbeda dalam pembacaan sehingga berbeda pula maknanya.

Sedangkan pada bagian isi terdiri dari 65 halaman. Sepanjang isi kandungan

KRBL, ada satu catatan pinggir yang dituliskan oleh Raja Ali Kelana sebagai komentar terhadap keterangannya sendiri. Catatan itu terdapat di halaman 12 yang berbunyi, *“Perkataan (dengan sebab kelebihan ilmu) mudah-mudahan kehendaknya dengan sebab tiada mengetahui akan kelebihan ilmu, karena itu orang kaya-kaya tiada hendak berhenti pada pintu ulama. alif ha. pengarang.”* Sebagaimana dijelaskan pada bagian awal KRBL, buku ini terdiri dari 31 ringkasan dengan 160 penceraiian atau penjelasannya. Setiap tema dan sub tema pembahasan dibedakan dengan istilah “ringkasan”. Sedangkan penjabaran atau penjelasannya disampaikan dalam bagian penceraiian. Rata-rata satu penceraiian hanya terdiri satu paragraf saja.

Raja Ali Kelana menggunakan beberapa referensi dalam penulisan KRBL ini dengan menyandarkan pada teks normatif dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sebagai penduan pendapatnya. Hal ini jamak dilakukan oleh para intelektual muslim dalam karya-karya ilmiahnya sebab Al-Qur’an dan Hadis merupakan sumber utama dan landasan penting kajian Islam normatif. Adapun kutipan dari al-Qur’an dalam KRBL ini sebanyak 30 ayat dan Hadis terdapat tiga buah saja.

Pemikiran Raja Ali Kelana yang tertuang dalam KRBL ini memuat enam konten, yakni (1) konsep raja dan kerajaan

beserta etika politik yang melingkupinya dibahas pada ringkasan pertama hingga kesembilan, (2) historiografi kepemimpinan sultan dan raja muda kerajaan Riau-Lingga yang diulas pada ringkasan 10 hingga 14, (3) kisah-kisah petuah dan nasehat tentang kepemimpinan, (4) etika komunikasi, (5) adab menjaga kesehatan, dan (6) syair nasehat. Keenam tema ini bagian dari arkeologi pemikiran Raja Ali Kelana yang terkandung dalam KRBL. Bagian mengupas tentang politik secara langsung ialah bagian pertama dan kedua. Bagian-bagian tersebut sejatinya memang merupakan satu rangkaian tema pembahasan.

Sebagaimana judul buku ini, pola penyampaian dalam karya ini memang ringkas dan padat. Raja Ali Kelana tidak bertele-tele dalam menyampaikan pendapatnya. Yang perlu mendapatkan perhatian ialah pada bagian sejarah kepemimpinan di Riau-Lingga. Tendensi penulisannya sangat condong ke sejarah Yang Dipertuan Muda (YDM) dibandingkan dengan sejarah Yang Dipertuan Besar (YDB). Mungkin hal ini tidak lepas dari sentimen pribadi Raja Ali Kelana yang keturunan Bugis-Melayu dan berdarah Palembang.

Apabila ditilik dari sejarah lahirnya karya ini, KRBL tidak lahir dalam ruang kosong. KRBL ditulis menjelang kerajaan Riau-Lingga dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tidak diketahui pasti kapan

dan berapa lama Raja Ali Kelana menuliskan naskah tersebut. Tetapi yang jelas ialah naskah ini telah diterbitkan pada 1910 atau setahun menjelang situasi politik genting di Penyengat, ketika Sultan Abdurrahman Muazzam Syah mengungsi ke Singapura dan dimakzulkan oleh Belanda, yang menginginkan kekuasaan penuh dengan menjadikan sultan sebagai boneka kekuasaan yang setara dengan pegawai pelaksana lapangan di bawah kontrak dan struktur keresidenan Belanda di Tanjungpinang.

Pada awal Abad 20 ini, Belanda telah beberapa kali mengajukan perjanjian atau kontrak baru tetapi selalu ditolak atau diulur waktu oleh sultan. Kontrak politik terakhir yang ditandatangani oleh Sultan Abdurrahman Muazzam Syah terjadi pada 1905 yang menuai banyak kritik dari para cendekia di Penyengat, khususnya yang tergabung dalam Rusydiah Klub. Tekanan terhadap sultan begitu kuat, apalagi rencana penandatanganan perjanjian itu tanpa melibatkan para pejabat dan cendekia di Penyengat kala itu. Raja Ali Kelana dan anggota Rusydiah Klub mengkritik pedas kebijakan tersebut karena mereka menilai bahwa perjanjian itu akan melemahkan posisi sultan serta merongrong marwah kerajaan. Oleh karena itu, setiap kali wacana berkembang selalu dikritisi oleh kelompok ini dan mereka pun berhasil mengubah mengubah perilaku politik politik, bahkan

sultan menjadi kerap mengkomunikasikan langkah-langkah politik dengan para pejabat, penasihat serta cerdik pandai di Penyengat. Sultan pun berani melawan karena mendapatkan dukungan dari bangsawan dan cerdik pandai.

Di tengah suasana seperti itulah KRBL dituliskan oleh Raja Ali Kelana atas permintaan Raja Kalid Hitam, yang tak lain adalah saudara dan karib dalam perjuangan melawan dominasi kolonialisme. Keduanya juga kerap berkerja sama dalam beberapa bidang usaha serta dalam gerakan intelektual di dunia Melayu. Tentang penulisan atas permintaan karibnya itu, diakui sendiri oleh Raja Ali Kelana pada bagian awal naskah KRBL.²⁴ Artinya, Walaupun ditulis secara ringkas, tetapi kandungannya cukup padat. Raja Ali Kelana sengaja memilih menuliskannya dengan sangat singkat agar mudah dan cepat dipahami oleh pembaca. Sebab itulah, ia memberi nama dengan *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas pada Orang yang Pantas*. Keterangan ringkas yang disampaikan Raja Ali Kelana dalam KRBL ini dituliskan dengan gaya sastra Melayu klasik sehingga para pembacanya tidak mudah jenuh.

Namun, sejarah telah mencatat bahwa Belanda telah memakzulkan Sultan Abdurrahman dan membubarkan kerajaan Riau-Lingga. Dampaknya, kerabat diraja

kemudian menyelamatkan diri ke Singpara dan Johor. Raja Ali Kelana sendiri menetap di Johor walaupun pemerintah Inggris yang menancapkan koloninya di Johor juga tidak suda atas kehadiran Raja Ali Kelana karena khawatir mengganggu suasana politik di kerajaan itu.²⁵ Akhir Raja Ali Kelana diangkat menjadi mufti dan mengabdikan di sana hingga akhir hayatnya.²⁶ Buahnya karyalah yang kini dapat dijadikan kajian untuk menggali khazanah intelektualnya sekaligus menjaga marwah dari tamadun melayu.

Nilai Etika Pemimpin dalam KRBL

KRBL memang banyak mengulas tema politik. Ulasan politik ini dimulai sejak dari awal pembahasannya hingga separuh dari isi KRBL. Bisa dibilang 75 persen dari kandungan KRBL bertemakan politik. Pembahasan tentang sejarah pun masih dalam perspektik politik. Bahkan, juga memuat tentang etika komunikasi politik. Raja Ali Kelana membahas bagaimana seorang penguasa berkomunikasi dengan rakyat dan bagaimana pula ketika berkomunikasi dengan pejabat. Yang tidak kalah menarik ialah ketika Raja Ali Kelana mengaitkan tentang ilmu dan akal dalam diskursus politik. Hal ini seakan

²⁵Buyong Adil, *Sejarah Johor* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajar Malaysia, n.d.), h. 330.

²⁶Syahri, dkk., *Raja Ali Kelana (1860-an - 1927) Dan Pondasi Historis Industri Pulau Batam*, h. 21.

²⁴Ali Kelana, *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas*, h. 1.

menegaskan bahwa konsep kekuasaan itu tidak lepas dari ilmu pengetahuan dan akal, sebagaimana tesis Michael Foucault yang menyebutkan bahwa orang yang memiliki wacana paling kuat adalah penguasa. Artinya, keilmuan dalam kekuasaan, menurut Raja Ali Kelana, merupakan sebuah keniscayaan. Berikut beberapa kriteria pemimpin dan acuan etika kekuasaan yang harus dimiliki oleh pemimpin dari arkeologi pemikiran Raja Ali Kelana.

1. Menjaga agama dan negeri

Raja Ali Kelana menilai bahwa penguasa memiliki martabat yang tinggi karena tugas dan tanggungjawab yang diembanya, yakni mengelokan agama dan negerinya. Dalam KRBL dituliskan sebagai berikut:

“Maka adalah pekerjaan ittifaq (Arab: sepakat-peny) dan muwafaqat (Arab: Mufakat) atas hal dan kelakuan yang satu bagi penggunaan yang menguat dan mengelokan agama dan wathan (tempat kejadian tumpah darah itu). sesungguhnya pekerjaan itu yang sangat kebajikan yang disuruh oleh Tuhan rab al-alamain dan enggan daripadanya itu sejahat-jahatnya pekerjaan

yang ditegah oleh Tuhan ilaahun mubiin.”²⁷

Menegakkan agama dan menjaga negeri dalam perspektif Raja Ali Kelana, merupakan bagian tugas dari kekuasaan yang harus diemban oleh penguasa. Karena itu, penguasa yang tidak menjaga agama dan negerinya hanya akan menimbulkan penyakit yang bisa membahayakan bagi kekuasaan dan kerajaan itu sendiri. Ketika seorang penguasa berbuat zalim, berarti ia telah bertindak yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat. Penguasa juga sebagai simbol bagi penyatuan tujuan bersama dalam kehidupan di dunia karena kewenangan dan kekuasaan yang melekat pada dirinya.²⁸

Dalam perspektif maqashid al-Syari'ah, menjaga agama adalah hal yang pokok. Sebab itu, kerajaan ataupun negara wajib menganut nilai-nilai dasar agama sebagai pedoman dan tujuannya. Apabila pondasi menjaga agama dalam negara ini telah ditegakkan, maka sifat dan sikap yang dimiliki seorang pemimpin juga haruslah memperlihatkan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Ada banyak sekali panduan norma dan etika dalam agama setiap pemeluknya dan lebih khusus lagi bagi setiap orang memiliki kekuasaan. Dari hasil kajian terhadap KRBL, terdapat beberapa pokok bahasan dari arkeologi pemikiran Raja Ali

²⁷Ali Kelana, *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas*, h.7.

²⁸ Ali Kelana, *Kumpulan...* h.. 33.

Kelana tentang pemimpin yang ideal. Nilai ideal itu tidak lepas dari karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin. Dan nilai-nilai karakter itu pula yang dijadikan landasan dalam etika kekuasaan.

Menurut Raja Ali Kelana, sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin yakni (1) perkasa dengan cita-cita yang besar dan perilaku yang bersih, (2) memahami sejarah sebagai panduan dalam memangku kekuasaan, (3) mempertimbangkan kadar perkara berdasarkan besar-kecil atau ringan-beratnya, (4) sabar bila sedang mengalami ujian, (5) kekayaan kerajaan untuk keadilan sosial (6) menolong pada kebenaran, (7) membahagiakan sesuatu dengan jalan yang benar dan sesuai kadarnya, (8) menunaikan janji dan belas kasih, (9) menghilangkan kesusahan dan kebinasaan, (10) mencurahkan pikiran untuk kebajikan dan pengalamannya, (11) interaksi dengan menteri berdasarkan tiga pedoman: apabila menteri salah agar tidak langsung dihukum, tidak boleh loba pada menteri yang kaya karena pengabdian, mengabulkan permintaan menteri bila dinilai patut.²⁹ Dengan demikian, menjadi agama sebagai dasar etika kekuasaan bagi setiap pemimpin merupakan suatu keniscayaan.

2. Bersikap adil

Pembahasan tentang adil cukup banyak disinggung dalam KRBL, sebab

menurut Raja Ali Kelana sikap adil menjadi syarat dan pedoman etik pemimpin. Kata adil digunakan dalam berbagai hal sehingga konsep keadilan sangat bersifat umum dan berlaku dalam berbagai bidang; hukum, sosial, ekonomi, dan lebih-lebih pada ranah politik kekuasaan. Dalam kekuasaan, keadilan adalah prinsip yang harus dipegang teguh karena ia memiliki konsekuensi bagi rakyat. Raja Ali Kelana menuliskan:

“Dan telah berkata seorang hakim yang bernama (.....) katanya, “bermula alam ini tempat kendaraan daripada adil. Dan apabila datang zalim, niscaya tiada teguh dan tetap.”³⁰

Dalam kekuasaan, adil merupakan hal pertama harus terpatri dalam diri seorang penguasa sehingga kebijakan dan tindakannya akan selalu berasaskan pada keadilan. Kekuasaan tanpa keadilan hanya akan menimbulkan malapetaka bagi negara dan rakyat. Adil tidak hanya digambarkan sebagai tindakan, melainkan juga sifat yang harus melekat pada penguasa dan seluruh aparatus dalam struktur kekuasaan. Kekuasaan adalah sarana menuju kemaslahatan namun sering pula menimbulkan sikap-sikap sebaliknya sehingga prinsip yang paling penting ialah keadilan dalam kekuasaan. Sebab itu, menurut Raja Ali Kelana, alam dunia ini

²⁹ Ali Kelana, *Kumpulan ...h.* 38–39.

³⁰ Ali Kelana, *Kumpulan ...h.*37.

merupakan kendaraan bagi sifat dan perilaku adil manusia dan dalam kekuasaan adil adalah segala permulaan dalam kekuasaan. Ia harus diterapkan dalam segala bidang bila ingin negara menjadi sejatera.

Setidaknya ada tiga bentuk pengejawantahan keadilan dalam kekuasaan, yakni pada ranah ekonomi, sosial, dan hukum. Kekuatan utama bagi ketiga sektor itu adalah kekuasaan politik pada suatu kerajaan, baik dari segi kebijakan dan realisasinya. Ketika ada diskriminasi dalam sektor ekonomi dan sosial, masyarakat tidak akan merasa aman dan nyaman. Begitu juga ketika ada diskriminasi dalam hukum, seperti hak istimewa bagi penguasa atau aparaturnya dan para elite di hadapan hukum, sedangkan bagi rakyat biasa hukum ditegakkan dengan sesuka penguasanya. Dalam uraiannya, Raja Ali Kelana mengidealkan tentang konsep keadilan dalam tiga sektor itu.

Keadilan dalam bidang ekonomi dan sosial memiliki konsekuensi pada kesejahteraan rakyat, yang maknanya identik dengan keadilan ekonomi dan sosial. Dalam pandangan Raja Ali Kelana tentang keadilan sosial ini sebagai berikut:

“...Tiada sultan melainkan dengan bala tentara, tiada tentara melainkan dengan harta, tiada harta melainkan dengan hasil negeri, dan tiada dapat hasil itu melainkan dengan

meramaikan, dan tiada boleh ramai melainkan dengan keadilan. Maka bermula keadilan itu permulaan daripada segala permulaan...”³¹

Penjelasan di atas menggambarkan bagaimana rantai ikatan antara keadilan dan hubungan dengan kesejahteraan negeri. Perekonomian yang menjadi bagian penting kekuatan negara hanya bisa terwujud bila keadilan ekonomi ditegakkan sehingga berdampak pula pada keadilan sosial sebab kesejahteraan tercapai. Semua itu bisa dicapai apabila kekuasaan menegakkan etika kekuasaan dengan baik. Ketika penguasa berlaku adil dalam perekonomian, masyarakat akan menjadi lebih produktif dan lebih bergairah dalam mengupayakan kebutuhan untuk penghidupannya. Dengan demikian, kesenjangan sosial juga akan semakin tipis sehingga diskriminasi dan kriminalitas berkurang.

Dari perspektif *maqashid al-syariah*, pemikiran Raja Ali Kelana ini mencerminkan suatu keharusan yang utama (*dharuriyah*) bagi setiap pemimpin. Apabila seorang pemimpin tidak berlaku adil, maka ia bisa menyebabkan hilangnya hak-hak masyarakat, baik dari hak hidup (menjaga jiwa), hak menjalankan ibadah agama, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak kebebasan menyatakan pendapat, hak menjaga kekayaan dan mendapatkan

³¹ Ali Kelana, *Kumpulan...*h. 15.

kelayakan, dan hak menjaga keturunan. Maka, pemikiran Raja Ali Kelana tentang adil sebenarnya memenuhi konsep *dharuriyah*.

3. Mewujudkan kesejahteraan rakyat

Kata sejahtera dalam KRBL cukup banyak sekali namun tidak dalam pembahasan tersendiri. Sejahtera ataupun kesejahteraan itu kerap dibahas bersamaan dengan tema-tema lain, khususnya dalam hukum dan ekonomi, seperti yang dibahas pada bagian akhir tema keadilan. Contoh lain tentang kesejahteraan ialah sebagai tertulis dalam KRBL:

“Telah masuk satu laki-laki bernama Syab bin Syaibah pada suatu hari atas satu raja bernama (Mahdi). Maka berkata ia baginya, ‘hai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala telah mengaruni Ia akan dikau akan dunia, maka beri oleh kamu akan rakyat engkau itu satu bahagian daripada yang baik-baik kehidupan engkau.’ Maka berkata raja, ‘apa yang patut bahwa diri rakyat itu?’ maka berkata Syab, ‘adil. Maka sesungguhnya apabila tidur rakyat itu di dalam sentosa, niscaya tidurlah engkau dengan

sentosa di dalam kubur engkau kelak.’”

Dari bahasan tersebut, terlihat bahwa kesejahteraan rakyat itu bergantung dengan sikap adil dari penguasanya. Menurut Raja Ali Kelana, pada dasarnya manusia membutuhkan kekuasaan untuk menjamin hak-haknya. Mereka kemudian dikumpulkan menjadi suatu kelompok kecil dan menjelma menjadi kelompok yang besar. Kekuasaan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan kelompok-kelompok tersebut agar ekistensinya tidak dieksploitasi oleh kelompok lain. Namun, terkadang kekuasaan itu sendiri justru digunakan untuk merongrong eksistensi rakyat yang mestinya dilindungi. Yang harus menjadi perhatian bagi para penguasa ialah rakyat karena mereka bisa merupakan kekuatan bagi kekuasaan dan negaranya. Kekuasaan yang tidak memberikan kesentosaan bagi rakyat hanya akan menimbulkan kekacauan sosial. Kekuasaan yang tidak didukung oleh rakyat, akan mudah diceraikan beraikan. Karena itu, kezaliman oleh pemangku kekuasaan akan menjerumuskan pada kehancuran.

Kesejahteraan umum atau *mashlahatul ummah* merupakan pedoman yang harus menjadi tujuan dari kekuasaan diiring dengan aksi dan sarana yang juga mengarah pada tujuan itu. Keselarasan tujuan, sarana dan aksi itu adalah satu kesatuan yang terejawantahkan dalam perilaku politik kekuasaan. Apabila penguasa tergelincir dari

tujuan umumnya, berarti ia telah menghadirkan satu penyakit pada kekuasaannya. Karena itu, penguasa harus mampu menjaga independen dan menjauhkan penyakit yang menggrogoti kerajaan ataupun kekuasaan. Dalam *maqashid al-Syariah*, kesejahteraan umum dalam bernegara adalah bagian dari upaya untuk menjaga jiwa, akal dan harta. Dengan demikian, pemikiran Raja Ali Kelana yang berkaitan dengan pedoman yang sekaligus menjadi landasan dalam etika kepemimpinan ini, juga termasuk perkara dharuriyah. Apabila kesejahteraan tidak tercapai, maka negara dalam keadaan genting dan membuat rakyat sengsara.

4. Setia dan berdedikasi

Sumpah setia termasuk salah satu pembahasan penting dalam kajian Raja Ali Kelana. Ia mengulas dalam satu pembahasan khusus dalam KRBL, yakni pada Ringkasan yang Kesembilan. Bahkan, pada bagian hikayat-hikayat, Raja Ali Kelana banyak menyebutkan tentang arti penting kesetiaan dalam kekuasaan. Menurut Raja Ali Kelana, kesetiaan yang berdasarkan pada agama itu terbagi menjadi tiga, yakni kesetiaan Tuhan pada manusia, kesetiaan manusia pada Tuhan, dan kesetiaan antara sesama manusia.³² Tiga model kesetiaan itu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia.

Dan khusus tentang relasi dengan kekuasaan, termasuk dalam golongan kesetiaan sesama manusia. Raja Ali Kelana menuliskan sebagai berikut:

“Dari pada hamba kepada hamba, yaitu setia raja kepada segala menteri dan yang menanggung pekerjaan raja dan segala yang bernaung di bawah tahta kerajaan. Demikian mereka itu bersetia pula pada rajanya. Dan adapun setia menteri-menteri dan segala yang bernaung di bawah keadilan wilayah raja itu, maka sesungguhnya mengakui berjanji, meneguhkan mereka itu akan raja itu bahwa rajanya tiada berhaluan kepada raja yang lain dan taat akan segala titah perintah yang benar. Dan demikian itu jua raja bahwa berjanji dan bersetia dengan bersungguh-sungguh pada memelihara mereka itu dengan adil dan insaf, kasih sayang sama ada di atas diri mereka atau harta benda mereka itu dengan segala barang yang bergantung dengan dia. Firman Allah ta’ala (yaa ayyuhalazdiina

³²Ali Kelana, *Kumpulan..* h. 22–24.

aamanuu uufuu bil'uquud)³³ artinya *"Hai segala mereka yang percaya akan Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan olehmu segala setia janjimu dengan ikatan yang kuat teguh di antaramu dan Allah serta segala manusia." Allah. Allah. Allah. Mudah-mudahan tetaplah setia-setia itu tiada berubah selamanya dan jangan seperti mereka itu yang telah disebutkan oleh Tuhan di dalam kitab-Nya (allazdiina yattakhizduunal kaafiriina auliya'a min duunil mukminiina yabtaghuuna 'indahumul 'izzata fainnal 'izzata lillahi jamiiiaa)*³⁴ artinya *sekalian mereka yang munafik itu ialah mereka yang menjadikan segala kafir itu penolong pada barang yang menyalahi mashlahat orang islam hal keadaan mereka itu meniggalkan orang yang mukmin, adakah patut dituntut oleh mereka itu pada sisi segala kafir itu kekuatan dan kemulyaan*

*yang tiada boleh dapat daripada mereka itu, tidak. Karena bahwasanya kekuatan dan kemuliaan itu bagi Allah jua sekaliannya."*³⁵

Dalam struktur kekuasaan, Raja Ali Kelana memandang loyalitas dan dedikasi erat hubungannya antara raja dan aparatusnya serta rakyat. Dalam sejarah kerajaan Riau Lingga, adanya kekuasaan itu merupakan bentuk dari sumpah setia para elite dalam membentuk sebuah kekuasaan. Dalam sejarah disebutkan bahwa terjadi pembagian kekuasaan dalam kerajaan Riau Lingga setelah pihak Melayu mendapatkan bantuan dari Bugis ketika menaklukan Raja Kecil. Raja Ali Kelana menilai bahwa peristiwa itu merupakan sumpah setia pertama yang dilakukan oleh kedua belah pihak hingga turun temurun pada masa Sultan Abdurrahman Muazzam Syah. Sumpah setia itu, sebagaimana disebutkan dalam catatan sejarah, tidak boleh dilanggar oleh anak cucu mereka karena bisa menimbulkan perpecahan dan kehancuran bagi kerajaan. Raja Ali Kelana juga mengulas ulang tentang kesetiaan yang telah dilakukan oleh sultan dan raja muda dalam penjelasan singkatnya. Dalam keterangannya itu, Raja Ali Kelana memberikan perhatian lebih perihal kesetaraan keturunan Bugis di dalam

³³Q.S. Al-Maidah (5): 1. Terjemah resmi Kemenang yakni *"Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu...."*

³⁴Q.S. An-Nisa': 139. Terjemah resmi Kemenang ialah, *"...yaitu (Orang-orang Munafiq) adalah Mereka yang mengambil orang-orang kafir sebagai aulia (Orang kepercayaan, orang terdekat, Pelindung) dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah."*

³⁵Ali Kelana, *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas*, h.24.

struktur kerajaan, khususnya tentang gelar yang disandang. Sebab itu, keturunan Bugis pertama mendapat gelar Sultan Alauddin Syah tetapi berada setingkat di bawah sultan Melayu.³⁶

Raja Ali Kelana memberikan perhatian besar tentang loyalitas dan dedikasi ini karena situasi politik dalam kerajaan yang tidak sarat dengan kepentingan para pejabat. Tampaknya, hal demikian itu disampaikan berkaitan dengan para menteri yang selalu mendukung upaya Sultan Abdurrahman Muazzam Syah untuk memenuhi setiap keinginan Belanda. Begitu juga sebagai kritik Raja Ali Kelana kepada sultan agar tidak membelot dari tujuan adanya kekuasaan. Kemelut dalam tubuh kerajaan memuncak ketika sultan beberapa kali justru melakukan pertemuan dengan Belanda untuk kontrak baru yang dinilai melemahkan posisi kerajaan. Hal ini tampak dari protes yang dilakukan oleh Raja Ali Kelana dan beberapa pejabat kerajaan ketika sultan berupaya menghapus jabatan Raja Muda dan menandatangani kontrak baru pada 1905. Kontrak tersebut dinilai hanya akan menjadikan sultan sebagai boneka Belanda dan kerajaan tidak lagi merdeka. Hal ini mempertegas bahwa loyalitas kekuasaan itu hanyalah untuk kesejahteraan rakyat.

Pemikiran Raja Ali Kelana tentang setia tidak langsung berhubungan dengan

jiwa-jiwa rakyatnya. Sifat dari kesetiaan dan dedikasi bagi seorang pemimpin ialah kebutuhan penunjang bila dari perspektif *maqashid al-Syariah*. Hal ini terlihat dari konsep kesetiaan dalam kekuasaan dalam pemikiran Raja Ali Kelana. Hubungan tiga aktor pokok dalam kekuasaan; pemimpin, pembantu pemimpin dan rakyat, adalah hubungan yang mesti dibangun dengan baik apabila tiga poin utama sebelumnya telah dipenuhi. Namun, apabila konsep awal tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya kesetiaan dan dedikasi seorang pemimpin patut dipertanyakan.

5. Menjaga Kebersamaan dan Persatuan

Persatuan merupakan tema yang mendapat perhatian oleh Raja Ali Kelana dalam KRBL, khususnya pada Ringkasan yang Ketujuh yang dimulai dari penceraian 26 hingga 36. Keterangannya melengkapi beberapa keterangan di bagian lain pada buku tersebut. Hal ini menandakan bahwa persatuan merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kunci dalam kekuasaan. Sebagaimana disebutkan dalam KRBL;

“Jikalau kita mengambil sedikit pandangan dan fikiran niscaya melihat kita akan kehendak setengah anggota itu bagi setengah yang lain. Dan sesungguhnya bahwa sekaliannya berhimpun dan

³⁶ Ali Kelana, *Kumpulan...* h. 31–32.

berpegang-pegangan atas perdirian yang satu dengan sebab menyempurnakan akan barang yang berhajat ia oleh seseorang. Maka demikianlah manusia sangat berkehendak mereka itu bagi berhimpun dan bersatu pada menetapkan perdirian mereka itu dengan segala kelakuan dan pekerjaan mereka itu.

Penceraian (28)

*Sesungguhnya berhimpun itu setengah dari pada pekerjaan dan kelakuan yang terlebih dicita-cita yaitu kesenangan hidup bagi pemeliharaan bagi yang dibangsakan kepada manusia serta ketinggiannya. Dan berganti-gantilah segala pekerjaan mereka itu dan segala perdirian itu dengan sebab segala yang diwajibkan dan segala huquq (hak-hak-peny) persekutuan pada segala pekerjaan yang zahir yang telah dijadikan dia oleh qudratul ilahiyyah pada menetapkan bagi yang dibangsakan kepada manusia itu.*³⁷

Dalam pandangan Raja Ali Kelana, pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Ia membutuhkan orang lain untuk

melengkapi bagian-bagian yang dibutuhkan namun tidak bisa dilakukan sendiri. Bahkan, hikmah dari perbedaan kelamin pria dan wanita juga bagian dari upaya untuk saling bersatu. Ia menjadikan menyandarkan pendapat pada Al-Qur'an.³⁸ Sebab itu, manusia perlu untuk berhimpun bersatu dengan yang manusia yang lain supaya sejahtera. Dengan berhimpun satu sama lain, manusia bisa saling mengenal dan tolong menolong. Berhimpun bersatu itu tidak memandang status sosial, politik, ekonomi, budaya maupun pendidikan dari seseorang. Semua perlu untuk bersatu padu menjadi sebuah komunitas ataupun kelompok untuk mencapai tujuannya.

Meski demikian, Raja Ali Kelana juga menggarisbawahi bahwa persatuan itu harus berdasarkan dengan aturan adat-istiadat dan hukum yang berlaku. Sebab, menurutnya, persatuan yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum dan adat istiadat akan menjauhkan dari tujuan bersama, bahkan hal itu tidak membawa tuah bagi persatuan tersebut. Namun, berhimpun bersatu dengan niat yang tulus untuk kemaslahatan orang banyak akan memberikan tuah dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat sebagaimana dalam *nash* Al-Qur'an.³⁹

³⁸Q.S. Al-Hujarat: 13. Artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal."

³⁹Q.S. Al-Maidah: 2. Artinya, "Dan tolong menolonglah atas kebaikan dan ketakwaan dan

³⁷ Ali Kelana, *Kumpulan...h.* 19.

Sebab itu, diperlukan beberapa syarat dalam membina suatu perhimpunan, yakni kesetiaan, menunaikan janji, membersihkan hati, rasa kasih sayang, serta saling membantu di kala susah. Artinya, berhimpun bersatu itu bukan saja diperlukan ketika dalam kesenangan, melainkan juga ketika sedang dalam kesusahan. Dalam penceritaan ke-35 Raja Ali Kelana menuliskan;

“Sesungguhnya setengah daripada segala yang wajib berhimpun akan saudara itu memelihara setia, dan menyempurnakan janji, dan bersih hati pada berkasih-kasihan, dan benar pada berkasih sayang, dan bersekutu pada kesusahan yang dahulu daripada kesenangan. Maka manakala dapat kita akan ini kelakukan pada mana-mana tempat berhimpun, niscaya tertanamlah pada segala hati, anggota berkasih sayang dan berjinakkan yang lemah lembut, dan teguh pertambatan dan hasil bersatu.”⁴⁰

Dalam kehidupan bernegara, persatuan merupakan kata kunci penting untuk bisa mencapai tujuan bersama. Kebajikan dan

manfaat dari persatuan itu harus kembali pada seluruh rakyat dan tanah air. Dalam konteks masyarakat di kerajaan Riau-Lingga yang terdiri dari berbagai suku bangsa Raja Ali Kelana memandang persatuan itu sangat penting. Apalagi, bangsawan dan kalangan elite di lingkungan kerajaan Riau-Lingga adalah keturunan Melayu dan Bugis. Bagi Raja Ali Kelana kedua belah pihak tidak boleh saling bercerai-berai karena bisa melemahkan kerajaan atau kekuasaan yang mereka pegang. Artinya, dalam menjalankan kekuasaan, para elite pemangku kekuasaan tidak boleh berjalan masing-masing, harus bersatu. Tidak bisa yang satu hendak ke kanan tetapi yang lain memilih ke kiri. Sinkronisasi langkah dalam memangku kekuasaan wajib diimplementasikan, baik terkait aksi, tujuan, maupun sarananya.

Dalam perspektif *maqashid al-Syari'ah*, pemikiran Raja Ali Kelana yang demikian itu mencerminkan perlunya nilai tambahan dalam memenuhi nilai utama. Kesetiaan atau menjaga kebersamaan memang sejatinya tidak melihat faktor suku, keturunan dan apalagi jabatan yang dipegang. Sejatinya kesetiaan pada negara itu adalah modal dasar untuk mencapai cita-cita. Maka, dalam etika kekuasaan, kesetiaan dalam beragam konsep yang disampaikan oleh Raja Ali Kelana, raja kepada menteri, raja kepada rakyat dan sebaliknya, adalah bagian kebutuhan *tahsiniah*.

jangan tolong menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan.”

⁴⁰Ali Kelana, *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas*, h. 21.

Secara umum, konsep-konsep karakter pemimpin dan etika kekuasaan yang disampaikan Raja Ali Kelana ini masih mencerminkan corak pemikiran normatif, sebagaimana yang menjadi ciri khas pemikir Islam abad pertengahan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh sumber referensi yang masih terbatas. Ia masih sangat memegang nilai-nilai universal dari norma agama dalam membangun konsepnya. Namun, di sisi lain, latar belakang lahirnya pemikiran politiknya juga mempengaruhi pemikirannya sehingga pada bagian-bagian tertentu, kritik yang disampaikan terlihat jelas memiliki tendensi khusus. Ia juga lebih banyak menukil dari konsep-konsep pemikiran sebelumnya, seperti karya Raja Ali Haji.

Penutup

Raja Ali Kelana menuliskan naskah KRBL sebagai respon terhadap kondisi politik ketika itu dimana Sultan Abdurrahman Muazzam Syah mendapat tekanan kuat dari pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan Sultan Abdurrahman sendiri juga berada di antara ambang keseimbangan antara tekanan dari luar (Hindia Belanda) dan dari dalam (kelompok Rusydiah Klub dan pejabat lainnya). Sebagai seorang cendekia yang pernah menjabat sebagai Engku Kelana dan sekaligus saudara tiri dari sultan, Raja Ali Kelana menuliskan RKBL ini agar menjadi panduan bagi seluruh pejabat di struktur kerajaan. Adapun kandungan naskah KRBL

memuat tentang beberapa tentang politik, tata negara, dan etika umum dalam bentuknya yang ringkas. Dari telaah yang dilakukan, terdapat beberapa nilai penting dalam etika kekuasaan sebagaimana tertuang dalam KRBL, yakni menjaga agama dan negara, bersikap adil, menyejahterakan rakyat, setia dan berdedikasi serta menjaga kebersamaan dan persatuan. Nilai-nilai tersebut, dalam pemikiran Raja Ali Kelana perlu menjadi panduan bagi setiap penguasa agar tidak melanggar norma agama yang berlandaskan pada *maqashid al-syari'ah*. Maka sangat wajar apabila konsep etika kekuasaan yang diidealkan Raja Ali Kelana ini disebut juga sebagai etika kekuasaan *maqashidi*, yakni suatu etika yang merujuk pada semangat nilai-nilai *maqashid al-syariah*. Meski demikian, tidak menutup peluang penelitian lanjutan untuk menguatkan konsep tersebut sehingga bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan etika kekuasaan yang sesuai dengan fenomena kekuasaan masa kini.

Pustaka Acuan

- Adil, Buyong. *Sejarah Johor*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajar Malaysia, n.d.
- Ali Haji, Raja. *Silsilah Melayu Bugis*. Tanjungpinang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2007.
- Ali Kelana, Raja. *Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas*. Singapura: Al-Imam, 1910.

- Barnard, Timothy P. "Taman Penghiburan: Entertainment and the Riau Élite in the Late 19th Century." *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 67, no. 2 (267 (1994): 17–46.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Erman, Erwiza, ed. *Sejarah Kesultanan Riau-Lingga dalam Perspektif Hukum dan Budaya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2012.
- Faisal, Muhammad. *Etika Melayu: Pemikiran Moral Raja Ali Haji*. Bintan: STAIN SAR Press, 2018.
- Hamidy, UU. *Teks Dan Kepengarangan Di Riau*. Pekanbaru: Unri Press, 1998.
- Harun, Jelani. "Kitab Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas: Karya Ketatanegaraan Melayu Yang Terakhir." *Sari (ATMA)* 19 (2001): 133–158.
- Haryatmoko, Johannes. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- L.man, Yovenska, and Olan Darmadi. "Karakteristik Pemimin dalam Islam." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4, no. 2 (December 8, 2019): 150. Accessed November 9, 2020. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2829>.
- Machiavelli, Niccolo. *Sang Pangeran - Risalah Politik Abad Ke-15*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Mahdini. "Raja dan Kerajaan Menurut Raja Ali Haji." Doktor, IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Matheson, Virginia. "Pulau Penyengat: Nineteenth Century Islamic Centre of Riau." *Archipel* 37, no. 1 (1989): 153–172.
- Mawardi, Abu Al-Hasan Al-. *Al-Ahkam as-Sulthoniyyah Wa al-Wilayat Ad-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr. Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Proudfoot, I. *Early Malay Printed Books: A Provisional Account of Materials Published in the Singapore-Malaysia Area up to 1920, Noting Holdings in Major Public Collections*. Kuala Lumpur: Academy of Malay Studies and the Library, University of Malaya, 1993.
- Putten, Jan Van der, and Al Azhar. *Di Dalam Perkenalan Dan Persahabatan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006.

- Rahman, Abd. "Konsep Mamlukah dan Keharusan Maṣlahah dalam Etika Kekuasaan Raja Ali Kelana 1849-1927." Masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Accessed September 1, 2020. <http://digilib.uin-suka.ac.id/21893/>.
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syahri, dkk., Aswandi. *Raja Ali Kelana (1860-an - 1927) Dan Pondasi Historis Industri Pulau Batam*. Batam: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2007.
- Syathibi, Abu Ishaq Al-. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. 2 vols. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kura, 1975.
- Thompson, Dennis Frank. *Etika Politik Pejabat Negara*. Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Yacob, M Amin. *Sejarah Kerajaan Riau-Lingga*. Pekanbaru: Unri Press, 2004.
- Yunus, R. Hamzah. *Naskah-naskah Kuno Riau*. Pekanbaru: Pusat Maklumat Kebudayaan Melayu Riau, Pulau Penyengat dengan Yayasan Sosial Chevron dan Texaco, Indonesia, 2001.